

**PENCANAAN STRATEJIK  
TAHUN 2006 - 2010**

**Instansi** : SEKRETARIAT KOTA SAMARINDA  
**Visi** : Terwujudnya Good Governance Dalam Administrasi Pemerintahan Guna Mendukung Samarinda Sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan dan Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan.

MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KEBIJAKAN		PROGRAM	
1	Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan serta Pembangunan yang Aspiratif, Transparan, Akuntabel serta Efektif dan Efisien	1.1	Terwujudnya koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, transparan, akuntabel, serta pengendalian pelaksanaan pemerintahan dan	1.1.1	Terciptanya koordinasi kebijakan pembinaan keagamaan, pendidikan, ketenagakerjaan, Pemuda Olah Raga, Sosial Budaya dan Peranan Wanita	- Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang dilaksanakan (kali)		1	Mewujudkan koordinasi peningkatan kualitas, peran dan kemandirian masyarakat	1	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan KB
						- Sosialisasi Ekonomi Kerakyatan khususnya bagi pemberdayaan kaum wanita yang dilaksanakan (kali)				2	Penyaluran Bantuan Masyarakat
						- Bantuan Pendidikan kepada Masyarakat yang disalurkan (%)				3	Peningkatan/Pembinaan Usaha



					<p>penyelenggaraan dan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Produk Hukum Daerah (%)</li> <li>- Tingkat Penyelesaian Pemkot di Pengadilan (%)</li> </ul>	4	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan		
			1.1.4	Terciptanya koordinasi kebijakan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Keluarga miskin mendapat beras dengan harga murah (%)</li> </ul>	5	Mendukung pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan	10	Kemandirian Bidang Ekonomi
			1.1.5	Terciptanya koordinasi kebijakan tentang pembinaan tata pemerintahan daerah bawahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya Kegiatan Pameran dan Promosi (keg)</li> <li>- Penambahan PAD dari Retribusi Surat Ijin Usaha (%)</li> <li>- Kejelasan batas masing-masing wilayah kecamatan/kelurahan (%)</li> <li>- Data Kecamatan Dalam Angka (buku)</li> </ul>	6	Memberikan kemudahan pelayanan proses perizinan dan berinvestasi	11	Pengelolaan Perijinan di Bidang Transportasi, Energi (BBM) dan Kehutanan
						7	Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan daerah bawahan	12	Program Penataan Daerah Otonomi Baru

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemekaran Kecamatan (%)</li> <li>- LKPJ da LPPD tepat waktu (%)</li> <li>- Monografi Kecamatan (buku )</li> <li>- Evaluasi Tugas Camat (%)</li> <li>- Data Otonomi Daerah (buku )</li> <li>- Tertib adm pemerintahan skpd (%)</li> </ul>			
	1.1.6	Terciptanya koordinasi kebijakan organisasi, kelembagaan dan tata laksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi Perangkat Daerah sesuai perundangan yang berlaku (%)</li> <li>- Struktur Organisasi Perangkat Daerah tersusun (%)</li> <li>- Data Kewenangan Pemerintah Kota tersedia (buku )</li> <li>- Pengembangan dan Penetapan Status Kelembagaan (%)</li> <li>- Kedisiplinan PNS dalam Berpakaian Dinas meningkat (%)</li> <li>- Standar Pelayanan Prima tersusun (%)</li> <li>- Mekanisme Kerja dan Tupoksi Perangkat Daerah tersusun (%)</li> </ul>	8	Memperkuat kelembagaan dan kelengkapan struktur organisasi yang didasarkan pada peraturan dan kebutuhan pemerintah daerah	1 Program Pengembangan Kelembagaan 3 Program Ketatalaksanaan 1 Program Analisa Formasi Jabatan 4	

					- Monev Pelaksanaan Pelayanan Publik terlaksana (Keg)				
					- Jumlah SKPD telah menyusun Renstra, Renja, PK dan LAKIP (%)				
					- Data Aparatur Perangkat daerah tersusun dan terevaluasi (%)				
					- Ketepatan Penempatan Jabatan dan beban kerja Pegawai Pemerintah Kota (%)				
			1.1.7	Terciptanya koordinasi dan pengendalian tugas penyelenggaraan pembangunan	- Monev Pelaksanaan Kegiatan pembangunan (%)	9	Meningkatkan efektifitas koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	15	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
			1.1.8	Terciptanya koordinasi kebijakan bidang pertanahan	- Sistem Informasi Pertanahan Kota Samarinda yang akurat dan lengkap (%)	10	Meningkatkan tertib administrasi pertanahan yang didukung dengan sistem informasi pertanahan yang handal	16	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
					- Jumlah penyelesaian konflik pertanahan (%)				Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

2	Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Kota	2.1	Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel	2.1.1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang valid up to date (%)</li> <li>- Analisa Standar Belanja tersusun (buku )</li> <li>- Standar Satuan Harga tersusun (Buku )</li> <li>- Kebijakan akuntansi pemerintah daerah tersusun (%)</li> <li>- Manual sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tersusun (%)</li> <li>- Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (%)</li> <li>- Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi (%)</li> <li>- APBD tepat waktu (%)</li> <li>- Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis komputer (%)</li> <li>- Menurunnya Jumlah dan Nilai temuan BPK terkait dengan administrasi dan (%)</li> </ul>	1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan lebih transparan dan akuntabel	1	<p>7 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</p> <p>8 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>
---	---	-----	---	-------	--	--	---	--	---	---

					keuangan				
					- Meningkatnya Opini BPK atas Laporan Keuangan Kota Samarinda s.d. WTP	(%)			
					- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	(%)			
					- jumlah investasi daerah	(%)			
			2.1. 2	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan barang daerah	- Data aset/ barang daerah yang valid dan up to date	(%)		1 9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
					- Jml Aset hasil Revaluasi/ appraisal	(%)			
					- Jml Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia secara memadai	(%)		2 0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. 2	Terwujudnya pembinaan aparatur yang profesional	2.2. 1	Meningkatnya Kualitas Aparatur	- Jumlah Pegawai Naik Pangkat tepat waktu	(%)	1 2	Meningkatkan tertib administrasi kepegawaian yang didukung sistem yang terintegrasi	2 1	Program Peningkatan Administrasi dan Pengembangan Kepegawaian Program peningkatan disiplin aparatur
					- Jumlah Pelanggaran disiplin pegawai menurun	(%)			
					- Jumlah Bantuan Tugas Belajar Pegawai	(%)		2 2	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas

						- Penambahan Jml Pegawai (%)					
						- Sistem adm kepegawaian (%)					